



Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar PBB Di Kediri

Dodik Jatmika¹, Asnawi², Yohanis Uryo³

¹ *Universitas Kahuripan, Kediri, Jawa Timur, Indonesia*

² *FEB Universitas Kahuripan Kediri, Jawa Timur, Indonesia*

e-mail: dodik_jatmika@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Penduduk Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan terdiri dari 53 Kepala Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ¹Kepemimpinan lurah di Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dikategorikan sedang. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, ²Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB dikategorikan sedang dikarenakan masyarakat belum dengan benar memahami tentang pembayaran PBB, ³ Kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Dusun Putuk Desa Banaran.

Kata Kunci: Kepemimpinan, PBB.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether there is an influence of the village head's leadership on public awareness of paying land and building taxes. The population in this study were the people of Putuk Hamlet, Banaran Village, Kandangan District, Kediri Regency. The population of Putuk Hamlet, Banaran Village, Kandangan Subdistrict consists of 53 heads of families. The result of the research shows that the village head leadership in Banaran Village, Kandangan Subdistrict, Kediri Regency is categorized as moderate. This is due to the lack of public participation in paying PBB, 2 Public awareness in paying PBB is categorized as moderate because the community does not properly understand about PBB payments, 3 The leadership of the village head influences public awareness in paying PBB in Putuk Hamlet, Banaran Village.

Keywords: Leadership, PBB.



PENDAHULUAN

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 12 dan 13, yaitu disebutkan tentang dana bagi hasil dari penerimaan PBB antara daerah propinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Penyaluran dana bagi hasil PBB sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-undang.

Sesuai dalam penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat daerah yaitu kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan dalam tugasnya yang I No. 1007/KMK.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan propinsi dan Walikota kepala pemerintahan kota dan Bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi di bawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itulah peranan kepala daerah sangat dituntut keaktifannya dalam hal pemungutan pajak ini.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal ini penanganannya. Sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri.

Perlawanan pajak yang diikuti anggapan yang salah oleh masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan akan sangat merugikan bagi negara, oleh karena itu dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut.



Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, maka peneliti mengambil Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian. Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang selama ini dikenal dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunannya berjalan baik, tidak luput dari adanya masalah dalam pembayaran pajak PBB oleh masyarakatnya. Adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri tersebut harus dilihat dari berbagai hal yang menyangkut akan kesadaran masyarakat itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Adakah Pengaruh Kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri”

Pemimpin dan Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan, (Kartini Kartono, 2003:76).

Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mengarahkan ataupun mengkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Sebagaimana diungkapkan Kartini Kartono (2003:27) bahwa :

“Pemimpin adalah seorang anggota kelompok yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kelompoknya dan yang memainkan peranan penting dalam merumuskan ataupun mencapai tujuan-tujuan kelompok. Seorang pemimpin merupakan penyalur bagi pikiran, tindakan dan kegiatan yang bersifat mempengaruhi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Hal ini berarti bahwa pemimpin selalu meliputi sejumlah besar masalah kekuasaan”

Pajak Bumi dan Bangunan

Ber macam-macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang perpajakan, namun kesemuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Soemahamidjaja dalam Brotodiharjo (2003:5), mengemukakan "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum menetapkan biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa korektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

"Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib yang membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mencapai prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, Walikota. Menurut Jatmika dan Andarwati (2018) *Performance is the success of achieving the target*



of an employee's work, three indicators, namely; quantity, quality and time. Dalam melaksanakan tugas pokok, lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa kuantitatif, dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:90). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Penduduk Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan terdiri dari 53 Kepala Keluarga.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:91), merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto (2010:104) yang mengatakan apabila populasi kurang dari 100 orang maka diambil dari keseluruhannya, namun apabila jumlah populasinya lebih dari 100 orang maka sampel dapat diambil sebesar 10%, 20%, 25%, atau lebih. Oleh karena itu merujuk pada pendapat di atas dikarenakan populasi Desa Banaran Kecamatan Kandangan ada 1183 Kepala Keluarga, sedangkan di Dusun Putuk sendiri terdapat 53 kepala keluarga, maka sampel penelitian diambil sejumlah keseluruhan dari populasi di Dusun Putuk yaitu sebanyak 53 kepala keluarga. Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 53 kepala keluarga. Dengan 1 informan yaitu Lurah Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel bebas yakni kepemimpinan lurah Desa Banaran dikategorikan sedang, hal ini dikarenakan kepemimpinan lurah di Desa Banaran memiliki system komunikasi yang baik, system komunikasi tersebut antara lain; system komunikasi lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB, system komunikasi lurah sebagai stabilisator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah), dan system komunikasi lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat). Akan tetapi Lurah Kota Matsum 3 jarang memberikan motivasi kepada masyarakat dalam pembayaran PBB, jarang dapat mempertanggung jawabkan dan merealisasikan setiap keputusan/



kebijakan yang di buatnya, hanya sebagian keputusan/ kebijakan saja yang dapat dipertanggung jawabkan dan direalisasikan, keaktifan lurah dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak juga jarang dilakukan, ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel terikat pada Dusun Putuk Desa Banaran dikategorikan sedang. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat Dusun Putuk Desa Banaran cukup baik dengan bukti, masyarakat mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, masyarakat mengerti akan tujuan pembayaran PBB, masyarakat berpendapat bahwa tarif PBB sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, masyarakat merasakan kemudahan dalam membayar PBB, masyarakat cukup memahami pentingnya fungsi dan manfaat PBB, masyarakat juga mengakui adanya usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB, masyarakat mengetahui adanya prosedur pembayaran PBB dan mudah memahami dan mengikuti prosedur pembayaran PBB tersebut, masyarakat juga mengetahui adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan dan terdorong membayar PBB pada saat jatuh tempo, akan tetapi juga ada sebagian besar masyarakat merasakan keberatan atas beban PBB, karena sebagian lainnya hanya mengikuti prosedur dan tidak memahaminya dengan benar.

Pengaruh Kepemimpinan Lurah terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara Kepemimpinan (X) dengan Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (Y), maka dapat dilihat dengan menggunakan rumus *korelasional product moment*, kemudian untuk menguji hipotesis maka digunakan rumus “t”, dan selanjutnya untuk melihat seberapa besar pengaruh kepemimpinan lurah (X) terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (Y), maka digunakan rumus *Koefisien Determinant*.

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kepemimpinan lurah (X) dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (Y), maka digunakan rumus product moment (Sugiyono, 2005;212) untuk mencari koefisien koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut.

Dari tabel di atas diketahui:

$$\Sigma X = 1445$$

$$\Sigma Y = 2744$$

$$\Sigma X^2 = 39543$$

$$\Sigma Y^2 = 142524$$

$$\Sigma XY = 74958$$

Maka Koefisien Korelasinya (r_{xy}) adalah:



$$r_{xy} = \frac{N \sum_{xy} - (\sum_x)(\sum_y)}{\sqrt{\{N \sum_{x^2} - (\sum_x)^2\} \{N \sum_{y^2} - (\sum_y)^2\}}}$$
$$r_{xy} = \frac{53.74958 - (1445)(2744)}{\sqrt{\{53.39543 - (1445)^2\} \{53.39543 - (2744)^2\}}}$$
$$r_{xy} = \frac{392774 - 3965080}{\sqrt{\{2095779 - 2088025\} \{7553772 - 7529536\}}}$$
$$r_{xy} = \frac{7694}{\sqrt{\{7754\} \{24236\}}}$$
$$r_{xy} = \frac{7694}{\sqrt{187925944}}$$
$$r_{xy} = \frac{3322}{22065.014}$$
$$r_{xy} = 0,561$$

Hasil perhitungan di atas akan memperlihatkan kemungkinan kemungkinan sebagai berikut:

- Koefisien korelasi yang diperoleh sama dengan nol ($r = 0$) berarti hubungan kedua variabel yang diuji tidak ada.
- Koefisien korelasi yang diperoleh positif ($r = +$) berarti kenaikan nilai variabel yang satu, diikuti nilai variabel yang lain dan kedua variabel memiliki hubungan positif.
- Koefisien korelasi yang diperoleh negative ($r = -$) berarti kedua variabel negatif dan menunjukkan meningkatnya variabel yang satu diikuti menurunnya variabel yang lain.

Dari perhitungan di atas maka diperoleh $r_{xy} = 0,561$ adalah bernilai positif, Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi, sedang atau rendah antara kedua variabel berdasarkan nilai r (koefisien korelasi) digunakan penafsiran atau interpretasi angka yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:214)

Tabel 1. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien korelasi

Interpretasi Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Tinggi
0,80 – 1,000	Sangat Tinggi

Dari ketentuan di atas jelaslah nilai koefisien korelasi yang diperoleh $r_{xy} = 0,561$ berada diantara 0,40 – 0,599 dengan pengertian tingkat hubungan kedua variabel adalah sedang. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa terdapat pengaruh Kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.



Uji Signifikan

Untuk menguji signifikan antara variabel X dan variabel Y dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Maka :

$$t = \frac{0,561\sqrt{53-2}}{\sqrt{1-(0,561)^2}}$$

$$t = \frac{0,561\sqrt{51}}{\sqrt{1-0,3147}}$$

$$t = \frac{0,561 \times 7,141}{\sqrt{0,6853}}$$

$$t = \frac{4,006}{0,827}$$

$$t = 4,844$$

Berdasarkan ketentuan pengujian hipotesis :

- jika harga $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis alternatif ditolak
- jika harga $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis alternatif diterima

Dari tabel distribusi t pada taraf 5% (0,05) dengan dk 51 diketahui $t_{tabel} = 2,00$ sedangkan t_{hitung} yang diperoleh = 4,844, dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,844 > 2,00), maka H_0 ditolak H_a diterima, dengan demikian terdapat pengaruh antara kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

Koefisien Determinan

Dengan Koefisien determinan kita dapat mengetahui berapa besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk itu kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KP &= (r_{xy})^2 \times 100\% \\ &= (0,561)^2 \times 100\% \\ &= 0,3147 \times 100\% \\ &= 31,47\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas maka besar pengaruh kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sebesar 31,47% berarti 68,53% lagi yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti faktor efektifitas kinerja aparat, pendidikan masyarakat, dll.



SIMPULAN

1. Kepemimpinan lurah di Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dikategorikan sedang. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, seharusnya Lurah Desa Banaran harus mengikut sertakan masyarakat dalam hal pembayaran PBB, karena masyarakatlah yang dapat memenuhi target pencapaian PBB yang ingin dicapai, dan juga jarang pemberian motivasi oleh lurah terhadap masyarakat dalam hal pembayaran PBB, serta jarang adanya pertanggung jawaban dan realisasi setiap keputusan yang dibuat lurah, tetapi dalam hal sistem komunikasi, menerima masukan-masukan dan saran, lurah Desa Banaran tergolong baik.
2. Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Dusun Putuk Desa Banaran dikategorikan sedang. Ini dikarenakan masyarakat di Dusun Putuk Desa Banaran belum dengan benar memahami tentang pembayaran PBB, karena masih banyak yang keberatan dengan beban PBB nya. Tetapi dalam hal mengetahui sebagai wajib pajak PBB dan mengerti tujuan dari PBB tersebut masyarakat Dusun Putuk Desa Banaran masih pada taraf yang baik.
3. Berdasarkan perhitungan rumus dan ketentuan yang dipakai, Dengan demikian dapat disebutkan bahwa terdapat pengaruh Kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Dusun Putuk Desa Banaran.
4. Pengaruh yang terdapat pada Kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Dusun Putuk Desa Banaran. Hal ini memberi kesimpulan bahwa apabila kepemimpinan lurah ditingkatkan maka otomatis dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Besar pengaruh kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Dusun Putuk Desa Banaran sebesar 31,47%.

DAFTAR RUJUKAN

- Brotodiharjo, Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- George R. Terry, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P, 2004, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jatmika, dodik & Andarwati, mardiana, The effect of motivation on employe performance through employe stisfaction of the tax office in surakarta, *International journal of economics, business and accounting research, vol 2, issue-1,2018//jurnal stie-aas.ac.id*
- Kartono, 1984, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kouzes & Posner, 2002, *Leadership The Challenge*, Airlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan edisi revisi*, Andi, Jakarta.
- Munawir, 1994, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 1983, *Administrasi & Organisasi Bimbingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nazir, Moch, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poedarminta, WJS, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.



- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahuk Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rivai, Veithzal, 2002, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Press co, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat dan Muttaqin, Zainal, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sunindhia, Y.w. Ninik Widyawati, Dra, 1993, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutarto. 1991. *Dasar-dasar Kepemimpinan Dalam Organisasi* Gajahmada University press, Yogyakarta.
- Toha, Miftah, 1987, *Prospektif Perilaku Birokrasi*, Rajawali press, Jakarta. Widjaya, HW, 1984, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Era Swasta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta.
- Winardi, Dr, 2000, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, PT Rineka Cipta, Jakarta. Wiwoho B. (Editor), 1990, *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Yayat M. Herujito, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta.
- Yukl, Gary, 1994, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Prenhall Indonesia, Jakarta